



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 99 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PAKENJENG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PAKENJENG TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 99**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN PAKENJENG
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping juga karena adanya pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, menuju **percepatan Pemulihan ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta penguatan Pelayanan Publik untuk kesejahteraan Masyarakat.**

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelegaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2018 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Gaut Tahun 2014–2019, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2019 antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perrimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 86 tahun 20217 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tata cara Evalauasi Rancanagan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang system informasi Pemerintah Daerah;
 7. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil Verifikasi, Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2019;
 10. Peraturan Bupati Garut Nomor 245 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 tentang pelimpahan Bupati Kepada Camat;
 11. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud;

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2022,

sebagai berikut :

1. Sebagai arah dan pedoman taktis dan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi kecamatan dalam pembangunan daerah.
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran.
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdayaguna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi kecamatan.

1.3.2. Tujuan :

Tujuan penyusunan rencana Kerja Kecamatan Kecamatan Pakenjeng Tahun 2022 adalah untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.4. Sistematika Penyusunan.

Sistematika Penulisan pada penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN :

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan penganggaran perangkat daerah tahun 2022

Bab V PENUTUP.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat Daerah Tahun lalu

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan renja Perangkat Daerah Tahun lalu

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota			
a. Administrasi Keuangan Daerah;			
• Target Keuangan	=	Rp. 1.654.093.321	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 1.654.093.321	100%
• Output/Keluaran	=	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah; - Evaluasi kinerja perangkat Daerah 	
• Outcome/Hasil	=	• Jumlah Dokumen	
b. Administrasi keuangan perangkat Daerah;			
• Target Keuangan	=	Rp. 1.655.523.321	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 1.655.523.321	100%
• Output/Keluaran	=	<ul style="list-style-type: none"> -Penyediaan gaji dan tunjangan ASN -Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 	

• Outcome/Hasil	=	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	
c. Administrasi kepegawaian Perangkat daerah;			
• Target Keuangan	=	Rp. 29.598.000	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp 29.598.000	100%
• Output/Keluaran	=	-Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya -Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	
• Outcome/Hasil	=	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	
d. Administrasi umum perangkat daerah;			
• Target Keuangan	=	Rp. 151.284.565	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 151.284.565	100%
• Output/Keluaran	=	-Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor -Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -Penyediaan peralatan rumah tangga -Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -Fasilitasi kunjungan tamu -Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	

• Outcome/Hasil	=	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi kantor	
e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;			
• Target Keuangan	=	Rp. 1.952.500	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 1.952.500	100%
• Output/Keluaran	=	-Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan -Prngadaan mebel -Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainya -Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainya	
• Outcome/Hasil	=	Persentase Aset dalam kondisi baik	
f. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahandaerah			
• Target Keuangan	=	Rp. 27.528.600	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 27.528.600	100%
• Output/Keluaran	=	-Penyediaan Jas komunikasi sumberdaya air dan listrik; -Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor -Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	
• Outcome/Hasil	=	Persentase ketersediaan Jasa penunjang urusan	

		pemerintahan daerah	
h. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;			
• Target Keuangan	=	Rp. 16.412.900	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 16.412.900	100%
• Output/Keluaran	=	-Penyediaan Jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
• Outcome/Hasil	=	Proses pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.			
a. Koordinasi penyelenggaraan kegiata pemerintahan di tingkat Kecamatan ;			
• Target Keuangan	=	Rp. 204.600.200	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 204.600.200	100%
• Output/Keluaran	=	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	
• Outcome/Hasil	=	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak			

dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan ;			
• Target Keuangan	=	Rp. 94.142.000	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 94.142.000	100%
• Output/Keluaran	=	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	
• Outcome/Hasil	=	Presentase penyelenggaraan PATEN	
3. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;			
a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa			
• Target Keuangan	=	Rp. 15.672.500	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 15.672.500	100%
• Output/Keluaran	=	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	
• Outcome/Hasil	=	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat di Desa	
b. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan			
• Target Keuangan	=	Rp. 23.092.000	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 23.092.000	100%
• Output/Keluaran	=	Peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan	
• Outcome/Hasil	=	Jumlah Lembaga kemasyarakatan tingkat	

		kecamatan yang berdaya	
4 . Program Koordinasi Ketentraman ketertiban umum;			
a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;			
• Target Keuangan	=	Rp. 134.341.500	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 134.341.500	100%
• Output/Keluaran	=	-Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat - Sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia TNI dan instansi vertical di wilayah kecamatan	
• Outcome/Hasil	=	Jumlah gangguan trantibum yang ditangani	
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah			
• Target Keuangan	=	Rp. 200.000.000	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 200.000.000	100%
• Output/Keluaran	=	-Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) wawasan kenagsaan dan ketahanan Nasional -Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan	

• Outcome/Hasil	=	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan	
6.Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
a. Fasilitas, Rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa			
• Target	=	Rp. 14.251.500	100 %
• Capaian Keuangan	=	Rp. 14.251.500	100 %
• Output/Keluaran		-Fasilitasi Administrasi tata pemerintahan Desa -Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan	
• Outcome/Hasil		Jumlah Desa yang berkinerja baik	

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.29 sebagai berikut :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah									
7						UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01					KECAMATAN										5.753.293.321						
7	01	01				100,00 %	100,00 %	3.954.771.786	4.325.821.786						100,00 %	4.890.793.321						
7	01	01	2,02					1.654.093.321	1.654.093.321							1.855.293.321						
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	1.639.793.321	1.639.793.321	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 Tahun	1.839.793.321	Kecamatan Pakenjeng	
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	14.300.000	14.300.000	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 Laporan	15.500.000	Kecamatan Pakenjeng	
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							29.598.000	14.598.000								31.500.000	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Tertentu				30 Stel	30 Stel	14.598.000	14.598.000	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	30 Stel	15.500.000	Kecamatan Pakenjeng	
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				3 Orang	3 Orang	15.000.000	0	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	3 Orang	16.000.000	Kecamatan Pakenjeng	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							215.410.465	231.410.465								168.500.000	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5 item	5 item	5.039.100	5.039.100	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	5 item	6.000.000	Kecamatan Pakenjeng	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor				43 Item	43 Item	94.662.665	110.662.665	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	43 Item	40.000.000	Kecamatan Pakenjeng	
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item Peralatan Rumah Tangga yang memadai				7 item	7 item	6.984.300	6.984.300	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	7 item	7.500.000	Kecamatan Pakenjeng	

7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			8 Jenis	8 Jenis	13.624.400	13.624.400	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	8 Jenis	15.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitas kunjungan tamu			1 Tahun	1 Tahun	33.600.000	33.600.000	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 Tahun	35.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Tahun	1 Tahun	61.500.000	61.500.000	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 Tahun	65.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2.011.728.500	2.381.778.500							2.800.000.000	
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			3 unit	3 unit	111.728.500	111.728.500	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	3 unit	130.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 Gedung	1 Gedung	1.900.000.000	2.270.050.000	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 Gedung	2.500.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana			9 item	9 item	0	0	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	9 item	170.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						27.528.600	27.528.600							32.000.000	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1 Tahun	1 Tahun	10.000.000	10.000.000	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 Tahun	12.500.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara			2 Item	2 Item	2.110.000	2.110.000	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	2 Item	2.500.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara			14 Item	14 Item	15.418.600	15.418.600	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	14 Item	17.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16.412.900	16.412.900							3.500.000	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan			10 unit	10 unit	16.412.900	16.412.900	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	10 unit	3.500.000	Kecamatan Pakenjeng

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	%	100,00 %	100,00 %	298.742.200	363.323.200				100,00 %	325.000.000			
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						204.600.200	269.181.200					220.000.000			
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Desa Berkinerja Baik			6 Kegiatan	6 Kegiatan	204.600.200	269.181.200	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	6 Kegiatan	220.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	94.142.000	94.142.000					1 Kegiatan	105.000.000		
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	94.142.000	94.142.000	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 Kegiatan	105.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						38.764.500	38.764.500						42.000.000		
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						15.672.500	15.672.500						17.000.000		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen RPTK			1 Dokumen	1 Dokumen	15.672.500	15.672.500	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Dokumen	17.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						23.092.000	23.092.000						25.000.000		
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kader PKK			1 Kegiatan	1 Kegiatan	23.092.000	23.092.000	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Kegiatan	25.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	%	100 %	100 %	134.341.500	84.341.500						100 %	180.000.000	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						134.341.500	84.341.500						180.000.000		
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	84.341.500	84.341.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 Kegiatan	115.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Masyarakat			1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 Kegiatan	65.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	%	100,00 %	100,00 %	200.000.000	200.000.000						100,00 %	300.000.000	

7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						200.000.000	200.000.000						300.000.000			
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 Kegiatan	300.000.000	Kecamatan Pakenjeng	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	14.251.500	11.151.500					100 %	15.500.000		
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							14.251.500	11.151.500						15.500.000		
7	01	06	2,01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan				1 kegiatan	1 kegiatan	14.251.500	11.151.500	Kab. Garut, Pakjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 kegiatan	15.500.000	Kecamatan Pakenjeng
TOTAL													4.640.871.486	5.023.402.486						7.593.086.642	

2.1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakenjeng;

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pakenjeng dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Pakenjeng meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain : Lingkungan Internal, meliputi :

Kekuatan :

1. Visi dan misi organisasi yang jelas;
2. Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan;
3. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan;
4. Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan;
5. Adanya sarana dan prasarana.

Kelemahan :

1. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi Pertikal di wilayah Kecamatan masih lemah;
3. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi;
4. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan.

1. Lingkungan Eksternal, meliputi :

Peluang :

1. RPJM Kabupaten Garut Tahun 2020 – 2024;
2. Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Garut;
3. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah;
4. Komitmen Pemerintah Kabupaten Garut dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik;

5. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan;
6. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas;
7. Adanya Diklat peningkatan kualitas aparatur;
8. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat;
9. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

 **Ancaman :**

1. Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai;
2. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah;
3. Egoisme sektoral yang mengganggu koordinasi;
4. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat;
5. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat;
6. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakenjeng
Provinsi/Kabupaten/Kota Garut

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			82	82,5	82,5	83,23	83,23	82,72	82,5			
2	Prosentase pengaduan / keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti oleh masyarakat				100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
3	Prosentase ASN yang memiliki presentasi kerja baik				100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	

2.1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pakenjeng bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. **Pemanfaatan** peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Garut kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang **kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi** kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, Kelembagaan dan Organisasi Massa (Ormas), potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna mencapai tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut.
2. **Optimalisasi** partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terutama pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, yaitu dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan **Company/Corporate Sosial Responsibility (CSR)**, maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. **Pelayanan Prima.** Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintahan Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya kepada pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

4. **Peningkatan Kapasitas Aparatur** dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

2.1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra) yang memuat:

- a) Rancangan kerangka ekonomi tingkat Kecamatan.
- b) Program prioritas pembangunan Tingkat Kecamatan dan.
- c) Rencana kerja Kecamatan.

Pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD Se-Kabupaten Garut dalam lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang berlokasi di wilayah Pakenjeng.

Dibawah ini kami sampaikan lampiran Tabel T-C.31 sebagai berikut :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah									
7						UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01					KECAMATAN											4.640.871.486	5.023.402.486			5.753.293.321	
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	%	100,00 %	100,00 %	3.954.771.786	4.325.821.786					100,00 %	4.890.793.321			
7	01	01	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.654.093.321	1.654.093.321						1.855.293.321			
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			1 Tahun	1 Tahun	1.639.793.321	1.639.793.321	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 Tahun	1.839.793.321	Kecamatan Pakenjeng		
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan			1 Laporan	1 Laporan	14.300.000	14.300.000	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 Laporan	15.500.000	Kecamatan Pakenjeng		
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						29.598.000	14.598.000							31.500.000			
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Tertentu			30 Stel	30 Stel	14.598.000	14.598.000	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	30 Stel	15.500.000	Kecamatan Pakenjeng		
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			3 Orang	3 Orang	15.000.000	0	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	3 Orang	16.000.000	Kecamatan Pakenjeng		
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						215.410.465	231.410.465							168.500.000			
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5 item	5 item	5.039.100	5.039.100	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	5 item	6.000.000	Kecamatan Pakenjeng		
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor			43 Item	43 Item	94.662.665	110.662.665	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	43 Item	40.000.000	Kecamatan Pakenjeng		

																	Dasar				
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item Peralatan Rumah Tangga yang memadai				7 item	7 item	6.984.300	6.984.300	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	7 item	7.500.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8 Jenis	8 Jenis	13.624.400	13.624.400	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	8 Jenis	15.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitas kunjungan tamu				1 Tahun	1 Tahun	33.600.000	33.600.000	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 Tahun	35.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	61.500.000	61.500.000	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 Tahun	65.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2.011.728.500	2.381.778.500							2.800.000.000	
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				3 unit	3 unit	111.728.500	111.728.500	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	3 unit	130.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Gedung	1 Gedung	1.900.000.000	2.270.050.000	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 Gedung	2.500.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana				9 item	9 item	0	0	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	9 item	170.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							27.528.600	27.528.600							32.000.000	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	10.000.000	10.000.000	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 Tahun	12.500.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara				2 Item	2 Item	2.110.000	2.110.000	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja	Kecamatan Pakenjeng	2 Item	2.500.000	Kecamatan Pakenjeng

															Umum		aparatur								
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara				14 Item	14 Item	15.418.600	15.418.600	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	14 Item	17.000.000	Kecamatan Pakenjeng				
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							16.412.900	16.412.900											3.500.000	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan				10 unit	10 unit	16.412.900	16.412.900	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	10 unit	3.500.000	Kecamatan Pakenjeng				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	%	100,00 %	100,00 %		298.742.200	363.323.200						100,00 %	325.000.000					
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							204.600.200	269.181.200							220.000.000					
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Desa Berkinerja Baik				6 Kegiatan	6 Kegiatan	204.600.200	269.181.200	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	6 Kegiatan	220.000.000	Kecamatan Pakenjeng				
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	94.142.000	94.142.000							1 Kegiatan	105.000.000				
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	94.142.000	94.142.000	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 Kegiatan	105.000.000	Kecamatan Pakenjeng				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							38.764.500	38.764.500							42.000.000					
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							15.672.500	15.672.500							17.000.000					
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen RPTK				1 Dokumen	1 Dokumen	15.672.500	15.672.500	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Dokumen	17.000.000	Kecamatan Pakenjeng				
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							23.092.000	23.092.000							25.000.000					
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kader PKK				1 Kegiatan	1 Kegiatan	23.092.000	23.092.000	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Kegiatan	25.000.000	Kecamatan Pakenjeng				

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	%	100 %	100 %	134.341.500	84.341.500					100 %	180.000.000		
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum						134.341.500	84.341.500						180.000.000		
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	84.341.500	84.341.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 Kegiatan	115.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Masyarakat			1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 Kegiatan	65.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	%	100,00 %	100,00 %	200.000.000	200.000.000						100,00 %	300.000.000	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						200.000.000	200.000.000							300.000.000	
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000	200.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 Kegiatan	300.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	%	100 %	100 %	14.251.500	11.151.500						100 %	15.500.000	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						14.251.500	11.151.500							15.500.000	
7	01	06	2,01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan			1 kegiatan	1 kegiatan	14.251.500	11.151.500	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pakenjeng	1 kegiatan	15.500.000	Kecamatan Pakenjeng
TOTAL											4.640.871.486	5.023.402.486							7.593.086.642	

2.1.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat;

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Pakenjeng pada Tahun 2019 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan dan pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati kepada Camat dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di wilayah Desa ;
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Unsur Forkompimcam, UPTD dan Organisasi/Instansi lainnya yang ada di wilayah Kecamatan.
5. Peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Kelembagaan dan Organisasi massa (Ormas) yang ada di wilayah Kecamatan
6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar dalam rangka mempermudah akses peningkatan derajat kehidupan masyarakat

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Pakenjeng maka keenam hal tersebut di atas perlu dilaksanakan oleh pengembangan delegasi.

Berdasarkan hasil Musrenbang TK desa dan TK Kecamatan menggambarkan Pembangunan di Kecamatan Pakenjeng yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2021 dengan berbagai usulan dari masyarakat diantaranya :

- ✚ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung kantor.
- ✚ Program Peningkatan sarana dan Prasarana perekonomian.
- ✚ Program Peningkatan Sarana dan prasaran Sosial Budaya.
- ✚ Program Peningkatan Sarana dan prasarana pasilitas umum lainnya

Dengan demikian hasil penelaahan terhadap usulan Program dan Kegiatan dari Kecamatan Pakenjeng telah menjadi rekomendasi Kecamatan untuk diusulkan melalui Musrenbang.

TABEL T-C.32
(HASIL RPTK PRIORITAS UNTUK THN 2022)

Tabel T-C.32.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2021**

Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan
Pakenjeng

N O	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota				
	Kegiatan				
	1 Administrasi kauangan Perangkat Daerah	Kec. Pakenje ng	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Pakenje ng	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		
	4 Administrasi Umum Perangkat Derah	Kec. Pakenje ng	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi kantor		
	6 Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan	Kec. Pakenje ng	Presentase Aset dalam kondisi baik		

		Daerah				
	7	Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pakenjeng	Prosentase kesediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan		
	8	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pakenjeng	Prosentase Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
	Kegiatan					
	1	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kec. Pakenjeng	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan		
	2	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Pakenjeng	Prosentase penyelenggaraan PATEN		
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
	Kegiatan					
	1	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pakenjeng	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat di Desa		

	2	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Kec. Pakenjeng	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang berdaya		
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Kegiatan					
	1	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pakenjeng	Jumlah gangguan Trantibum yang ditangani		
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
	Kegiatan					
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Ddaerah	Kec. Pakenjeng	Prosentase pelaksanaan urusan Pemerintahan umum di Kecamatan		
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
	1	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.		Jumlah Desa yang berkinerja baik		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan *acuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Pakenjeng dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah Kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Pakenjeng mempunyai tujuan ;

- 1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur;
- 2) Meningkatkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan;
- 3) Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam pembangunan;

Optimalisasi keterlibatan Potensi masyarakat dalam Pemerintahan, meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan asset serta kesejateraan sosial dengan sasaran:

- 1) Tersedianya aparatur yang professional;
- 2) Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja secara optimal;
- 3) Terakomodasinya gagasan dan kepentingan masyarakat;
- 4) Terwujudnya kondusivitas dan sinergitas secara optimal.

3.3. Program Dan Kegiatan Proritas

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Pakenjeng maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

1. Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah;
3. Administarsi Kepegawaian Perangkat daerah;

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

g. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
7																			
					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN					4.431.435.952									4.982.431.582
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.611.049.632									3.971.854.595
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					45.000.000									49.200.000
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	3 dokumen	80 %	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80 %		22.000.000
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 dokumen	80 %	25.000.000			Prosentase Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80 %		27.200.000
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.655.523.321									1.821.075.653
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	jumlah tersedianya gaji ASN yang tersedia selama 1 tahun	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 tahun	80 %	1.639.793.321	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	80 %		1.803.772.653
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	jumlah dokumen keuangan yang tersedia	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 dokumen	80 %	15.730.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	80 %		17.303.000
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					32.557.800									35.813.580

7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	30 Orang	80 %	16.057.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	80 %	17.663.580
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	4 tahun	80 %	16.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	80 %	18.150.000
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							236.951.511				260.646.662	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor	Tercapainya pemenuhan Pelayanan Administrasi kantor	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 tahun	80 %	5.543.010	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	80 %	6.097.311
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya pemenuhan Pelayanan Administrasi kantor	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	37 Jenis	80 %	104.128.931	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	80 %	114.541.824
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Tercapainya pemenuhan Pelayanan Administrasi kantor	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	25 Jenis	80 %	7.682.730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	80 %	8.451.003
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Tercapainya pemenuhan Pelayanan Administrasi kantor	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	6 Jenis	80 %	14.986.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	80 %	16.485.524
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Pelaksanaan fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercapainya pemenuhan Pelayanan Administrasi kantor	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1320 Per orang	80 %	36.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	80 %	40.656.000

7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya pemenuhan Pelayanan Administrasi kantor	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	12 Bulan	80 %	67.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	80 %	74.415.000	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.592.901.350						1.752.191.485
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Unit Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Aset dalam kondisi baik	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	100 %	2 unit	100 %	122.901.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	135.191.485	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Item Pengadaan mebel	Persentase Aset dalam kondisi baik	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	100 %	4 item	100 %	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	440.000.000	
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Aset dalam kondisi baik	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	100 %	1 paket	100 %	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	77.000.000	
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya dan pengadaan Tanah	Persentase Aset dalam kondisi baik	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	100 %	1 gedung	100 %	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	1.100.000.000	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								30.281.460						33.309.606
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Pembayaran tagihan Jasa Komunikasi sumber Daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	12 bulan	80 %	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	80 %	12.100.000	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	jumlah Item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	4 Item	80 %	2.321.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	80 %	2.553.100	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	2 orang	80 %	16.960.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	80 %	18.656.506	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								17.834.190						19.617.609

7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah pemeliharaan operasional kendaraan dalam lingkungan kantor dan jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan	Tercapainya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang baik	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	8 Unit	80 %	17.834.190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	80 %	19.617.609			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								328.616.420							361.478.062	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								225.060.220								247.566.242
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang di laksanakan	ProsentaseJumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	6 Kegiatan	80 %	225.060.220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	80 %	247.566.242			
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								103.556.200							113.911.820	
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	% Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Pulik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	jumlah Jenis Pelayanan	Tercapainya Penyelenggaraan PATEN sesuai rencana	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	5 Pelayanan	80 %	103.556.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Pulik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	80 %	113.911.820			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								42.640.950							46.905.045	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								17.239.750							18.963.725	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	Jumlah dokumen RPTK	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 Dokumen	80 %	17.239.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	80 %	18.963.725			
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								25.401.200							27.941.320	
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang berdaya	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	66 orang	80 %	25.401.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	80 %	27.941.320			
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								147.775.650							270.705.315	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								55.000.000							60.500.000	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani		80 %	80 %	10 Kejadian	55.000.000			Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	80 %	60.500.000			
7	01	04	2,03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								92.775.650							210.205.315	

7	01	04	2,03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Pelaksanaan Patroli	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	12 Bulan	10 Kejadian	92.775.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	80 %	210.205.315		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								270.000.000						297.000.000	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								270.000.000							297.000.000
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Bimtek Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	250 Orang	80 %	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	80 %	55.000.000		
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkoncam	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 Kegiatan	80 %	220.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	80 %	242.000.000		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								31.353.300						34.488.565	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								31.353.300							34.488.565
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang berkinerja baik	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 Kegiatan	80 %	15.676.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	80 %	17.244.250		
7	01	06	2,01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Sosialisasi Penegakan Perda di Kecamatan	Jumlah Desa yang berkinerja baik	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 Kegiatan	80 %	15.676.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	80 %	17.244.315		
TOTAL													4.431.435.952						4.982.431.582	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng terlihat dalam Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra 2019-2024

Program merupakan kumpulan dari kegiatan yang menggambarkan Tindakan tidak yang dilakukan untuk menjalankan Misi yang akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kecamatan Pakenjeng mempunyai Program dan kegiatan yang didukung oleh Pagu indikatif dalam rangka penyelenggaraan Program sebesar Rp. 4.431.435.952 (*Empat Milyar Empat ratus Tiga puluh Satu Juta Empat ratus Tiga puluh Lima Ribu Sembilan ratus Lima puluh Dua Rupiah*) terdiri dari enam Program dan beberapa kegiatan yang tertuang pada tabel berikut;

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota			
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;			
• Target Keuangan	=	Rp. 1.655.523.321	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 1.655.523.321	100%
• Output/Keluaran	=	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah; - Evaluasi kinerja perangkat Daerah 	
• Outcome/Hasil	=	• Jumlah Dokumen	
b. Administrasi kepegawaian Perangkat daerah;			
• Target Keuangan	=	Rp. 32.557.800	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp 32.557.800	100%
• Output/Keluaran	=	-Pengadaan Pakaian Dinas	

		beserta atribut kelengkapannya -Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	
• Outcome/Hasil	=	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	
c. Administrasi umum perangkat daerah;			
• Target Keuangan	=	Rp. 236.951.511	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 236.951.511	100%
• Output/Keluaran	=	-Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunkantor -Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -Penyediaan peralatan rumah tangga -Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -Fasilitasi kunjungan tamu -Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
• Outcome/Hasil	=	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi kantor	
d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;			
• Target Keuangan	=	Rp. 1.592.901.350	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 1.592.901.350	100%
• Output/Keluaran	=	-Pengadaan kendaraan	

		perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan -Prngadaan mebel -Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantir atau bangunan lainya -Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainya	
• Outcome/Hasil	=	Persentase Aset dalam kondisi baik	
e. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahandaerah			
• Target Keuangan	=	Rp. 30.281.460	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 30.281.460	100%
• Output/Keluaran	=	-Penyediaan Jas komunikasi sumberdaya air dan listrik; -Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor -Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	
• Outcome/Hasil	=	Persentase ketersediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	
f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;			
• Target Keuangan	=	Rp. 17.834.190	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 17.834.190	100%
• Output/Keluaran	=	-Penyediaan Jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak	

		kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
• Outcome/Hasil	=	Proses pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.			
a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;			
• Target Keuangan	=	Rp. 225.060.220	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 225.060.220	100%
• Output/Keluaran	=	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	
• Outcome/Hasil	=	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	
b. Koornasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan ;			
• Target Keuangan	=	Rp. 103.556.200	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 103.556.200	100%
• Output/Keluaran	=	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	
• Outcome/Hasil	=	Presentase penyelenggaran PATEN	

3. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;			
a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa			
• Target Keuangan	=	Rp. 17.239.750	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 17.239.750	100%
• Output/Keluaran	=	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	
• Outcome/Hasil	=	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat di Desa	
b. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan			
• Target Keuangan	=	Rp. 25.401.200	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 25.401.200	100%
• Output/Keluaran	=	Peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan	
• Outcome/Hasil	=	Jumlah Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang berdaya	
4 . Program Koordinasi Ketentraman ketertiban umum;			
a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;			
• Target Keuangan	=	Rp. 147.775.650	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 147.775.650	100%
• Output/Keluaran	=	-Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	

		- Sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia TNI dan instansi vertical di wilayah kecamatan	
• Outcome/Hasil	=	Jumlah gangguan trantibum yang ditangani	
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah			
• Target Keuangan	=	Rp. 270.000.000	100%
• Capaian Keuangan	=	Rp. 270.000.000	100%
• Output/Keluaran	=	-Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) wawasan kenagsaan dan ketahanan Nasional -Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan	
• Outcome/Hasil	=	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan	
5. Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
a. Fasilitasi, Rekomendasi, dan koordinasi pembeinaan dan pengawasan Pemerintahas Desa			
• Target	=	Rp. 31.353.300	100 %
• Capaian Keuangan	=	Rp. 31.353.300	100 %
• Output/Keluaran		-Fasilitasi Administrasi tata pemerintahan Desa -Fasilitasi penerapan dan	

	penegakan peraturan perundang undangan
• Outcome/Hasil	Jumlah Desa yang berkinerja baik

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Pakenjeng dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam visi Kabupaten Garut.

Perencanaan ini dibuat secara partisipasi, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *Stakeholder* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Pakenjeng. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Pakenjeng ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta Visi dan Misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan Implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 atau Tahun keempat, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut;

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga Implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan Implementasi Renstra serta untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja yang sudah dibuat.
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *Stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktivitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari Rencana Kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karenanya perlunya komunikasi dan Sosialisasi Renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan Rencana Strategis yang dibuat.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan tempat yang telah ditetapkan di Rencana Kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja yang telah dibuat.

5. Monitoring dan Evaluasi serta Pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dilakukan terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dalam rangka menjamin pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Pakenjeng.

Dengan mengharap keridhoan Allah Yang Maha Kuasa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan, sehingga tujuan akhir untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Amin.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN